

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran .

Satpol PP memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja, target kinerja, program, dan anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), menunjukkan bahwa :

1. Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkadadengan target 100 % realisasicapaian kinerja 100 ^
2. Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan dengan target 85 % realisasi capaian kinerja 100 %
3. Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target 100 % realisasi capaian kinerja 100 % ini menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dengan baik

Berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024, menunjukkan bahwa Capaian realisasi kinerja tercapai 100 %.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pata tahun 2024, masih ada hambatan/permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya :

1. Masih kurangnya pemahaman paratur terhadap tugas pokok dan fungsi mengakibatkan tidak optimalnya dalam pelaksanaan tugas
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat belum dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Sehingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas belum dilakukan secara maksimal.
3. Sarana dan prasarana penunjang belum tersedia secara memadai sehingga pelayanan belum bisa optimal.
4. Masih terbatasnya tenaga PPNS

Akhirnya semoga LKjIP Satpol PP Tahun 2024 dapat bermanfaat serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Satpol PP Kota Bengkulu dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa menerangi, meridhoi dan melindungi jalan kita menuju kebaikan.

Bengkulu , 28 Februari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



Drs. YURIZAL

Pembina Utama Muda/ IV.C

Nip. 19670402 198903 1004

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr Wb.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan izin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun. Proses kinerja Satpol PP Kota Bengkulu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Satpol PP Kota Bengkulu.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengetahui kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Akhirnya kami berharap semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa merestui dan tetap bersama kita. Amin.....

Bengkulu , 28 Februari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



Drs. YURIZAL

**Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 19670402 198903 1004**

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA	ii
PENGANTAR	
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR	iv
TABEL	
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Keadaan Pegawai	7
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	9
1.6 Keuangan	11
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Indikator Kinerja Utama	17
2.3 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	22
3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	27
3.1.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah	28
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi yang dilakukan	29
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32
3.2 Realisasi Anggaran	34
BAB VII PENUTUP.....	39
LAMPIRAN	

1950

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	7
1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	8
1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	8
1.4	Sarana dan Prasana Pada Satpol PP Kota Bengkulu Tahun 2024	11
1.5	Pagu Anggaran Tahun 2024	11
1.6	Pagu Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2024	12
1.7	Anggaran Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	12
2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	17
2.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3	Indikator Kinerja Utama	18
2.4	Perjanjian Kinerja	19
3.1	Pengukuran Kinerja Satpol PPTahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
3.2	Sub Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	24
3.2	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran	24
3.3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu	25
3.4	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran	27
3.5	Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu Tahun 2022 dan 2023	28
3.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat Daerah	28
3.7	Realisasi dan Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
3.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.9	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	34
3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2024	35
3.11	Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2023 dan 2024	38

DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Judul Grafik	Halaman
1.1	Grafik Jumlah Pegawai Satpol PP Tahun 2023	7
3.1	Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024	34
3.2	Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran	38





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disempurnakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 4 berbunyi setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian manajemen yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. SAKIP diterapkan untuk mengukur tingkat keberhasilan kerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun.

Penyusunan LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawabkan secara periodik.

Setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara harus melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan setiap tahunnya wajib untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai terhadap pengukuran kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu membantu Walikota melaksanakan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

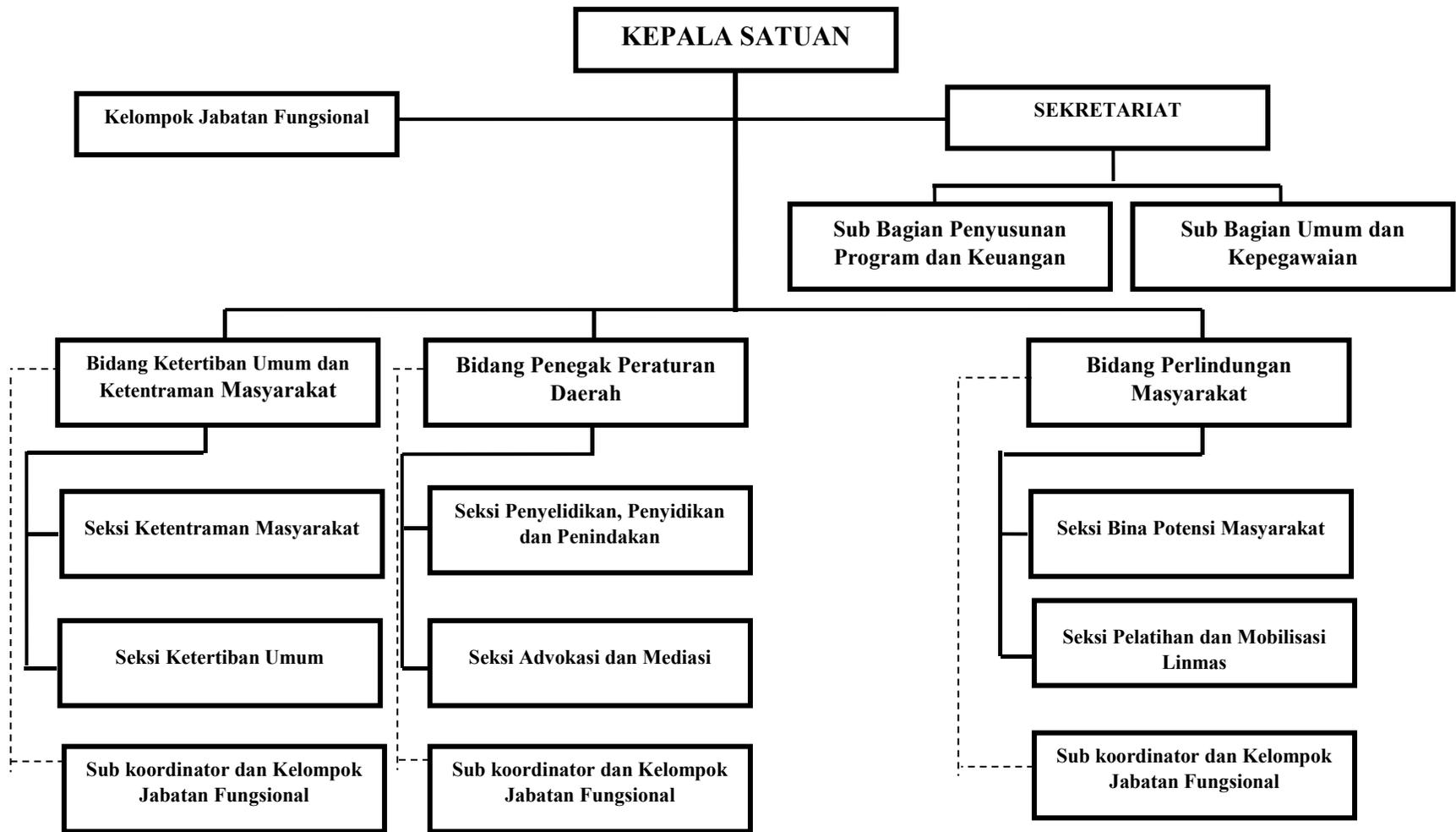
Adapun struktur organisasi Satpol PP Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan



3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketertiban Umum
 - b. Seksi Ketentraman Masyarakat
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 - a. Seksi Advokasi dan Mediasi
 - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penindakan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Potensi masyarakat
 - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Linmas
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

**Struktur organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja**





Satpol PP Kota Bengkulu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota, pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Perumusan kebijakan di Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
- d. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e. Pendataan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat
- f. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Pelaksanaan administrasi di Satuan Polisi Pamong Praja
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3 Isu Strategis

Sejalan dengan upaya penataan kinerja, maka keamanan dan ketertiban di Kota Bengkulu menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di Kota Bengkulu. Di era otonom daerah dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan.



Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda terdepan dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Perda dan Perkada yang dibuat oleh Pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya aparatur yang mengawal bahwa Perda dan Perkada tersebut dilaksanakan serta dipatuhi baik oleh masyarakat, badan hukum maupun aparatur itu sendiri.

Isu strategis yang terkait dengan pencapaian tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bengkulu adalah belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di tahun 2024 yaitu :

- a. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas
 - Kurangnya tenaga PPNS, hal ini berpengaruh pada proses penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah
 - Keterbatasan sarana dan prasarana
- b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Masih adanya perspektif negatif terhadap Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah
 - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
 - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat



Prioritas Satuan Polisi Pamong Kota Bengkulu dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan Tibumtrammas serta perlindungan masyarakat adalah :

- a. Mengoptimalkan kinerja pegawai / anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam pelaksanaan tugas-tugas
- b. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana Satpol PP
- c. Penegakan perda yang lebih humanis sehingga lebih bisa diterima oleh masyarakat
- d. Menjalani koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan aparatir penegak hukum lainnya termasuk dinas/instansi terkait dalam penanganan masalah trantibum

1.4 Keadaan Pegawai

Kondisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

- a. PNS : 33 orang
- b. PTT : 231 orang

Grafik 1.1
Grafik Jumlah Pegawai Satpol PP Tahun 2024



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS			NON PNS			Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Strata 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-
2	Strata 2 (S2)	6	-	6	1	-	1	7
3	Strata 1 (S1)	14	1	15	33	19	52	67
4	Diploma III (D3)	-	-	-	1	1	2	2
5	Diploma II (D2)	-	-	-	-	1	1	1
	Diploma I (D1)	-	-	-	1	-	1	1
6	SLTA	12	-	12	138	36	174	186
7	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	32	1	33	176	58	231	264



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	3	-	3
4	Eselon IV a	7	1	8
5	Eselon IV b	-	-	-
6	Staf	20	-	20
Jumlah		32	1	33

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda/ Ia	-	-	-
2	Juru Muda Tk I/ I b	-	-	-
3	Juru / I c	-	-	-
4	Juru Tingkat I / I d	-	-	-
5	Pengatur Muda / II a	-	-	-
6	Pengatur Muda Tk.I / II b	1	-	1
7	Pengatur / II c	4	-	4
8	Pengatur Tk.I / II d	5	-	5
9	Penata Muda / III a	2	-	2
10	Penata Muda Tk.I / III b	-	-	-
11	Penata / III c	5	-	5
12	Penata Tk.I / III d	8	1	9
13	Pembina / IV a	5	-	5
14	Pembina Tingkat I/ IV b	1	-	1
15	Pembina Utama Muda / IV c	1	-	1
16	Pembina Utama Madya/ IV d	-	-	-
17	Pembina Utama / IV e	-	-	-
Jumlah		32	1	33



1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP Kota Bengkulu menempati gedung kantor di Jalan A.Yani Pasar Baru Koto I Kel.Pasar Baru Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu.

Sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

a. Gedung Kantor

Gedung kantor paling sedikit terdiri atas :

1. Ruang kerja pimpinan dan staf
2. Ruang pos jaga
3. Ruang rapat
4. Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan
5. Ruang penyimpanan barang / gudang
6. Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil
7. Ruang sidang majelis kode etik
8. Tempat apel / upacara
9. Halaman parkir

b. Kendaraan operasional

Kendaraan operasional yang dimaksud terdiri atas :

1. Sepeda motor
2. Mobil jenis offroad/jeep
3. Mini bus
4. Truk kecil
5. Truk sedang
6. Truk besar
7. Serta jenis kendaraan lain



c. Perlengkapan Operasional

Perlengkapan operasional dimaksud paling sedikit terdiri atas perlengkapan :

1. Perorangan

Perlengkapan perorangan meliputi :

- a. Pakaian dinas
- b. Tonfa dan holster tonfa
- c. Borgol
- d. Tameng
- e. Senter
- f. Ferplas
- g. Tas atau ransel
- h. Sleeping bag
- i. Jaket
- j. Rompi / body protector
- k. Masker

2. Beregu

Perlengkapan beregu merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu, perlengkapan ini dapat berupa matras, tenda pleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi. Namun saat ini perlengkapan ini belum ada di Satpol PP.

3. Patroli

Perlengkapan patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas patroli.

4. Penegakan perda dan perkara

Perlengkapan patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Penegakan perda dan perkara

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Secara umum kondisi sarana dan prasarana di Satpol PP Kota Bengkulu cukup memadai untuk pelaksanaan tugas-tugas. Berikut rincian daftar sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP Kota Bengkulu :



Tabel 1.4
Sarana dan Prasana Pada Satpol PP Kota Bengkulu
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	GEDUNG KANTOR		
1	Gedung kantor	1 unit	Baik, bukan milik sendiri
2	Pos Jaga	1 unit	Pos jaga di Pasar Minggu (Kondisi butuh perbaikan)
B.	KENDARAAN OPERASIONAL		
1	Kendaraan dinas roda 4	3 unit	BD 1094 CY, 1683 AY, BD 9156 AY
2	Kendaraan patroli roda 4	4 unit	BD 9159 AY, BD 9280 AY, BD 9454 AY, BD 9455 AY
3	Kendaraan Dalmas/truk	2 unit	BD 8093 AY
4	Kendaraan roda 2	12 unit	BD 5546 CY, BD 2465 CY, BD 2463 CY, BD 2466 CY, BD 5811 AY, 5815 AY, BD 6210 AY, BD 2467 CY, BD 4181 AY, 2464 CY, BD 6232 AY, BD 6019 CY
C.	PERLENGKAPAN OPERASIONAL		
1	Tameng	40 Buah	Baik
2	Helm	20 Buah	Baik
3	Pentungan	20 Buah	Baik

1.6 Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kota Bengkulu dibiayai dari APBD Kota Bengkulu Tahun 2024

Tabel 1.5
Pagu Anggaran Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/Kurang
		Rp	%	
BELANJA DAERAH	12.504.687.884	11.072.813.572	89	1.431.874.312
BELANJA OPERASI	12.445.816.684	11.018.042.372	88,53	1.427.774.312
Belanja Pegawai	4.587.947.632	4.425.497.817	96,46	162,449.815
Belanja Barang	7.857.869.052	6.592.544.555	83,90	1.265.324.497
BELANJA MODAL	58.871.200	54.771.200	93,04	4.100.000
Belanja Peralatan dan Mesin	58.871.200	54.771.200	93,04	4.100.000



Tabel 1.6
Pagu Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2024

Uraian Belanja	Pagu Anggaran		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lebih/Kurang
BELANJA DAERAH	12.531.127.202	12.504.687.884	- 26.439.318
BELANJA OPERASI	12.472.256.002	12.445.816.684	- 26.439.318
Belanja Pegawai	4.635.341.950	4.587.947.632	- 47.394.318
Belanja Barang	7.836.914.052	7.857.869.052	20.955.000
BELANJA MODAL	58.871.200	58.871.200	0
Belanja Peralatan dan Mesin	58.871.200	58.871.200	0

Di tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.484.687.884,- realisasi anggaran sebesar Rp. 11.072.813.572,- dengan rincian dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1.7
Anggaran Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	9.365.787.884	8.890.926.231	95%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.521.400	28.564.592	91%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.316.400	26.564.592	97%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.205.000	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.554.507.632	4.396.007.817	97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.407.082.632	4.261.352.817	97%
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	146.425.000	133.655.000	91%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	100%



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.096.000	0	0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.096.000	-	97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.793.000	156.221.133	90%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.003.800	2.000.000	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	62.069.200	57.048.700	92%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	5.999.900	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.072.000	-	0%
	Fasilitas kunjungan tamu	1.155.000	-	0%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100.493.000	91.172.533	91%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.155.700	10.155.700	100%
	Pengadaan mebel	10.155.700	10.155.700	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.496.563.452	4.235.674.400	94%
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.998.200	1.990.000	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	58.680.000	17.213.000	29%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.060.000	2.840.000	70%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4.431.825.252	4.213.631.400	95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.150.700	64.302.589	93%
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dinas/operasional	69.150.700	64.302.589	93%



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.138.900.000	2.181.887.341	70%
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.844.900.000	2.142.598.441	75%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	382.752.000	308.971.000	81%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.056.148.000	1.604.539.341	78%
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.750.000	-	0%
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	250.000.000	184.354.100	74%
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	101.250.000	44.734.000	44%
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	6.000.000	-	0%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	189.171.400	37.457.600	20%
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.000.000	-	0
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	59.171.400	9.989.500	17
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.000.000	27.468.100	27
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	104.828.600	1.831.300	2%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	104.828.600	1.831.300	2%
	Jumlah	12.504.687.884	11.072.813.572	89%



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol

PP Kota Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi.
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Keadaan Pegawai
- 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6 Keuangan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
 - 3.1.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
 - 3.1.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah
 - 3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi yang dilakukan
 - 3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan termasuk anggaran.

Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang dijabarkan kedalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja untuk satu tahun. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat undang-undang diatas, Satpol PP Kota Bengkulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2024-2026. Rencana strategis ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja



Kota Bengkulu merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai.

Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Meningkatkan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan PERKADA	Peningkatan Sosialisasi Dan Patroli Trantibmas
			Peningkatan Pengawasan Dan Penegakan Perda

Tabel 2.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan Penegakan PERDA dan PERKADA yang Mendorong Akuntabilitas dan Kondusivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan	75%	80%	80%
			Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	100%	100%

2.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada $\times 100\%$	Satpol PP Kota Bengkulu	
				Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Akibat Penegakan Hukum Perda Dan Perkada		
				Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah Perda / Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan $\times 100\%$	Satpol PP Kota Bengkulu
					Jumlah Keseluruhan Perda Dan Perkada Yang Memuat Sanksi	
		Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	Penanganan Penindakan Trantibumlinmas Yang Diselesaikan $\times 100\%$	Satpol PP Kota Bengkulu	
			Pengaduan Trantibum Linmas Yang ditangani			
2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Kemenpan RB Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kemenpan RB	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Satpol PP Kota Bengkulu	Dokumen RR Pada Satpol PP Kota Bengkulu	Satpol PP Bengkulu	

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2024.



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase	100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	Persentase	100 %
		Jumlah Dokumen RR Satpol PP Kota Bengkulu	Dokumen	1 Dokumen
		Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu	Nilai	BB
3.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi	2 Inovasi



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024- 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023) dan juga Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 25)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan
- b. Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja kementerian/lembaga

Adapun cara Adapun cara menghi tung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin inggi realisasai menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja	Pemberian Atribut
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan guna mengetahui tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program di Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang ditetapkan



3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menetapkan sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Satpol PPTahun 2024
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	100 %	86 %	86 %
	Jumlah Dokumen RR Satpol PP Kota Bengkulu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu	BB	BB	100 %
Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun	2 Inovasi	2 Inovasi	100 %



Berdasarkan data Tabel. 3.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada**

Persentase penindakan pelanggaran Perda dan Perkada dari target 100 % realisasi sebesar 100 % atau capaian kinerja sebesar 100 %

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase penindakan pelanggaran perda dan perkada yang dilakukan. Untuk mengukur indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Penanganan Penindakan Trantibumlinmas Yang Diselesaikan}}{\text{Pengaduan Trantibum Linmas Yang ditangani}} \times 100$$

$$\frac{8}{8} \times 100 = 100$$

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dari target yang telah ditetapkan di peroleh capaian sebesar 100 %, ini berarti bahwa target kinerja dapat dicapai 100 %. Dari 8 pengaduan yang masuk semuanya dapat diselesaikan.

➤ **Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi**

Persentase administrasi umum , prasarana dan sarana penunjang perangkat daerah yang dipenuhi dari target 100 % realisasi sebesar 86 % atau capaian kinerja sebesar 86 %. Hal ini dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Untuk mengukur indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Persentase administrasi umum , prasarana dan sarana penunjang perangkat daerah yang dipenuhi..}}{\text{Persentase administrasi umum , prasarana dan sarana penunjang perangkat daerah yang menjadi target}} \times 100$$

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{86}{100} \times 100 \% = 86 \%$$

Dapat dilihat bahwa dari target yang telah ditetapkan di peroleh capaian sebesar 86 %. Ini berarti bahwa target kinerja dapat dicapai 86 %. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu cukup baik dalam memenuhi sarana dan prasarana penunjang.



Tabel 3.2
Sub Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.096.000	Tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kuota peserta Diklat sudah full sehingga tidak bisa mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat PPNS
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Fasilitas kunjungan tamu	1.072.000 1.155.000	

➤ **Jumlah Dokumen RR Satpol PP Kota Bengkulu**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang di selenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam Pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu (1) identifikasi risiko dan (2) analisis risiko

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai peraturan yang berlaku secara terintegrasi ke dalam



kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menyusun dokumen risk register sebagai upaya melaksanakan pengendalian atas risiko yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan organisasi. Dokumen Risk Register yang disusun berupa 1 (satu) dokumen risk register, sehingga target kinerja berupa 1 (satu) dokumen Risk Register dapat terpenuhi sesuai target, sehingga target kinerja tercapai 100 %.

➤ **Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu**

Nilai saki dari target BB realisasi BB atau capaian kinerja sebesar 100 %. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bengkulu untuk Tahun diperoleh bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah 74,40 termasuk dalam kategori “BB”.

Tabel 3.3
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
Tahun 2023

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,25
	Jumlah	100	74,40

Dalam rangka perbaikan nilai saki Kota Bengkulu, berikut hal-hal yang telah dilakukan :

- Memperbaiki dokumen saki
- Mencapai target capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada
- Mengevaluasi kembali kinerja yang belum tercapai



➤ **Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun**

Jumlah inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu untuk Tahun 2024 di targetkan 2 (dua) inovasi, dari target tersebut bisa direalisasikan sejumlah 2 (dua) inovasi yaitu Satpol PP Sigap dan Satpol PP Humanis sehingga realisasi kinerja tercapai 100 %

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum serta memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Bengkulu, melakukan terobosan yang merupakan inovasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu mengusung 2 (dua) inovasi yaitu Satpol PP Sigap (Siap dan Tanggap) dan Satpol PP Humanis.

Satpol PP Sigap (Siap dan Tanggap), bertujuan memberi pemahaman yang kepada masyarakat bahwa Satpol PP bukan hanya siap dalam menegakan perda, perwal, pengamanan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat namun Satpol PP juga siap dalam menjalankan perannya yang lain diantara sigap dalam membantu penanggulangan bencana maupun penyelamatan serta selalu ada di masyarakat jika ada masyarakat yang tertimpa musibah (meninggal dunia) maupun pengamanan jika masyarakat membutuhkan pengamanan untuk keramaian (pesta pernikahan).

Satpol PP Humanis perlu di sampaikan ke masyarakat dikarenakan citra Satpol PP dimata masyarakat termasuk buruk, masyarakat cenderung menganggap bahwa Satpol PP dalam bersikap dan bertindak lebih mengutamakan kekerasan dan arogansi. Hal inilah yang harus dihilangkan dari masyarakat, untuk melaksanakan tugas-tugasnya Satpol PP harus bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, hal ini bisa diwujudkan jika masyarakat menganggap Satpol PP adalah sahabat, bukan musuh mereka. Sehingga Satpol PP dalam setiap tindakannya harus lebih bersikap humanis dan santun.



3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya (Tahun 2023) dengan target kinerja sasaran tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023	Capaian Kinerja		% Capaian Kinerja 2024
				2024	2024	
1	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	%	85 %	100%	100%	100 %
2	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	%	100%	96%	86 %	86 %
3	Jumlah Dokumen Risiko (Risk Register) Satpol PP Kota Bengkulu	Dokumen	1	1	1	100 %
4	Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu	Predikat	BB	BB	BB	100 %
5	Jumlah inovasi dalam 1 tahun	Buah	2	2	2	100%

Berdasarkan data Tabel. 3.2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Persentase penindakan pelanggaran perda dan perkara**

Dari table 3.2 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2023 dan 2024 terdapat kesamaan realisasi kinerja yaitu 100 % hal ini dapat diartikan bahwa kinerja 2 (dua) tahun berturut-turut untuk penegakkan perda adalah baik

➤ **Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi**

Ditahun 2023 dari target yang telah ditetapkan sebanyak 100 % dapat direalisasi sebesar 96 % dari target hal ini masih menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan di tahun 2024 capaian kinerja sebesar 86 % hal ini dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

➤ **Jumlah Dokumen Risk Register Satpol PP Kota Bengkulu**

Jumlah dokumen risk risisko Satpol PP pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen dan di tahun 2024 juga 1 (satu) dokumen, ini berarti setiap tahunnya Satpol PP Kota Bengkulu selalu menyusun dokumen risk register



- Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu
Untuk nilai AKIP tahun 2022 Satpol PP kota Bengkulu mendapat predikat “BB” dengan nilai 72 sedangkan di tahun 2023 juga diperoleh hasil dengan predikat “BB” dengan nilai 74,40

Tabel 3.5
Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu
Tahun 2022 dan 2023

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30	17,70	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,25	20,25
	Jumlah	100	72	74,40

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja tahun 20223 dan 2024 untuk Satpol PP Kota Bengkulu berkinerja sangat baik.

3.1.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah

Pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2024 dengan target kinerja sasaran jangka menengah yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu selama lima tahun mendatang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	100%	100%	100%
			Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan	85%	90%	95%
		Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakkan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	100%	100%



Tabel 3.7
Realisasi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Indikator Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			1	2	3
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	100 %	-	-
		Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan	100 %	-	-
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100 %	-	-

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja untuk tahun 2024 dapat terpenuhi dengan sangat baik, target tiga indikator yang telah ditetapkan di tahun 2024 dapat direalisasi sebesar 100 %. Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan periode Renstra (2024-2026)

3.1.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang dilakukan

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu pada tahun 2024 :

1. Faktor Internal

a. Faktor Pendukung

- Dukungan dana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Satpol PP setiap tahunnya selalu di dukung dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan



Anggaran (DPA). Walaupun masih jauh dari ideal namun setidaknya mampu untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan. Dukungan dana yang cukup sangat diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian kinerja

➤ Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM)

Semangat kerja dan loyalitas aparatur Satuan Polisi Pamong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sangat baik. Mulai menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP baik dari segi kemampuan, pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi, termasuk tentang disiplin aparatur. Walaupun belum sepenuhnya tetapi sudah menunjukkan adanya peningkatan, tentunya masih harus terus ditingkatkan baik lewat pembinaan, evaluasi kinerja, rapat staf maupun dengan mengikuti pelatihan dan diklat.

b. Faktor Penghambat

➤ Kondisi sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran tugas-tugas dilapangan. Namun saat ini kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bengkulu belum cukup memadai. Di tahun 2023 Satpol PP Kota Bengkulu berpindah kantor, yang berada di kawasan Pasar Barukoto I sehingga membutuhkan penataan kembali. Saprass yang belum ada antara lain :

- ❖ Belum adanya gudang untuk menyimpan barang sitaan
- ❖ Belum adanya ruangan khusus untuk penyidik
- ❖ Belum adanya barak bagi anggota
- ❖ Masih kurangnya kendaraan patrol
- ❖ Masih kurangnya pos penjagaan yang layak

Solusinya adalah :



- Berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor dengan cara memasukkannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
- Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk menambah sarana dan prasarana
 - Anggaran kegiatan yang masih minim
 - Masih terbatasnya tenaga PPNS

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Pendukung

- Dukungan dari pimpinan daerah, memotivasi dan memberikan dukungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Satpol PP
- Koordinasi dan kerja sama antar dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu khususnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan dan penindakan terhadap kasus pelanggaran perda. Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari OPD teknis terkait

b. Faktor Penghambat

- Pemahaman dan ketaatan Masyarakat terhadap PERDA sangat kurang sehingga masih banyak adanya pelanggaran terhadap perda
- Kondisi ekonomi menjadi alasan paling sering ditemukan dalam pelanggaran perda, seperti sulitnya melakukan penertiban pasar

Solusi yang dilakukan:

- Melakukan penegakan Perda secara humanis, sehingga bisa mengurangi bentrok di lapangan dengan masyarakat dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda juga akan semakin baik.



3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berupa sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya manusia terhadap indikator kinerja dengan cara melihat capaian indikator kinerja dengan penggunaan sumber daya yang digunakan. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya.

Anggaran Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu sebesar Rp. 12.504.687.884,- yang terdiri dari 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 11.072.813.572,- atau 89 %.

Jika dilihat dari kondisi sumber daya manusia dan kondisi sarana dan prasarana Satpol PP yang kurang tetapi dapat mencapai hasil kinerja yang baik menunjukkan bahwa ada usaha untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam rangka pencapaian kinerja

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Pagu	Realisasi	%	
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100 %	12.504.687.884	11.072.813.572	89 %	11 %

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan di atas, bahwa capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Kota Bengkulu pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat baik. Keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Ada 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan 10 (sepuluh) sub kegiatan prioritas ditambah lagi 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 20



(dua puluh) sub kegiatan penunjang. Program/kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.138.900.000	2.181.887.341	70%
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.844.900.000	2.142.598.441	75%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	382.752.000	308.971.000	81%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.056.148.000	1.604.539.341	78%
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.750.000	-	0%
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	250.000.000	184.354.100	74%
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	101.250.000	44.734.000	44%
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	6.000.000	-	0%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	189.171.400	37.457.600	20%
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.000.000	-	0
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	59.171.400	9.989.500	17
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.000.000	27.468.100	27
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	104.828.600	1.831.300	2%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	104.828.600	1.831.300	2%



3.2 Realisasi Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian Belanja	Pagu Anggaran		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lebih/Kurang
BELANJA DAERAH	12.531.127.202	12.504.687.884	- 26.439.318
BELANJA OPERASI	12.472.256.002	12.445.816.684	- 26.439.318
Belanja Pegawai	4.635.341.950	4.587.947.632	- 47.394.318
Belanja Barang	7.836.914.052	7.857.869.052	20.955.000
BELANJA MODAL	58.871.200	58.871.200	0
Belanja Peralatan dan Mesin	58.871.200	58.871.200	0

Grafik 3.1
Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024





Tabel 3.10
Realisasi Anggaran
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	9.365.787.884	8.890.926.231	95%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.521.400	28.564.592	91%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.316.400	26.564.592	97%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.205.000	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.554.507.632	4.396.007.817	97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.407.082.632	4.261.352.817	97%
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	146.425.000	133.655.000	91%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.096.000	0	0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.096.000	-	97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.793.000	156.221.133	90%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.003.800	2.000.000	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	62.069.200	57.048.700	92%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	5.999.900	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.072.000	-	0%
	Fasilitas kunjungan tamu	1.155.000	-	0%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100.493.000	91.172.533	91%



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.155.700	10.155.700	100%
	Pengadaan mebel	10.155.700	10.155.700	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.496.563.452	4.235.674.400	94%
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.998.200	1.990.000	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	58.680.000	17.213.000	29%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.060.000	2.840.000	70%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4.431.825.252	4.213.631.400	95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.150.700	64.302.589	93%
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dinas/operasional	69.150.700	64.302.589	93%
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.138.900.000	2.181.887.341	70%
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.844.900.000	2.142.598.441	75%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	382.752.000	308.971.000	81%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.056.148.000	1.604.539.341	78%
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.750.000	-	0%
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	250.000.000	184.354.100	74%



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	101.250.000	44.734.000	44%
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	6.000.000	-	0%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	189.171.400	37.457.600	20%
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.000.000	-	0
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	59.171.400	9.989.500	17
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.000.000	27.468.100	27
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	104.828.600	1.831.300	2%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	104.828.600	1.831.300	2%
	Jumlah	12.504.687.884	11.072.813.572	89%

Di tahun 2024 ini total pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu adalah Rp. 12.504.687.884,- terdiri 2 program, 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan realisasi anggaran 11.072.813.572,- atau 89 %.

Perbandingan anggaran dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.11
Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	2023			2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	Belanja Daerah	9.054.191.725	8.654.142.402	96%	12.484.687.884	11.072.813.572	89%
1	Belanja Operasi	9.021.050.125	8.643.551.402	96%	12.425.816.684	11.018.042.372	89%
	Belanja Pegawai	4.356.617.000	4.061.565.893	93%	4.567.947.632	4.425.497.817	97%
	Belanja Barang dan Jasa	4.664.433.125	4.581.985.509	98%	7.857.869.052	6.592.544.555	84%
2	Belanja Modal	33.141.600	10.591.000	32%	58.871.200	54.771.200	93%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.141.600	10.591.000	32%	58.871.200	54.771.200	93%

Grafik 3.2
Perbandingan Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran



Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu untuk tahun 2024 baik secara kinerja ataupun secara anggaran dapat direalisasikan dengan baik. Dengan realisasi anggaran 89 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024.

Dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024 ini disadari belum sempurna, namun setidaknya diharapkan dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024.

Langkah-langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban laporan, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu di masa mendatang.

Bengkulu, 28 Februari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU



Drs. YURIZAL

Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 19670402 198903 1004

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**

